

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG**

Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The city of Semarang is one of the tourist destinations for foreign and domestic tourists. Tourism villages were formed to empower the community so that they can act as direct actors in an effort to increase readiness and concern for village potential or tourist attractions in their respective villages. The development of the Nongkosawit Tourism Village can be said to be still not developing well or seems slow like other tourist villages, allegedly because the roles between the government, the community, and the private sector have not been optimal in tourism development. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods. The results of this study are that there are five roles of stakeholders in the development of the Nongkosawit Tourism Village, namely policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. Stakeholders involved in the development of the Nongkosawit Tourism Village are POKDARWIS Kandang Gunung, Semarang City Culture and Tourism Office, Nongkosawit Village, Bappeda of Semarang City, Disporapar of Semarang City Public Works Service, Central Java, Universitas Negeri Semarang, Tourist, and the Nongkosawit community. The conclusion of this study is that the relationship between stakeholders is still found that is not optimal so that it hinders the development of the Nongkosawit Tourism Village. Suggestions from this research is the relationship between internal stakeholders such as the community and POKDARWIS still needs to be improved and the existing problems must be resolved immediately.

Keywords: Stakeholders, Role of Stakeholders, Tourism Village Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia mengunggulkan sektor pariwisata dalam memperoleh devisa negara dikarenakan sebagai salah sektor yang berpengaruh dalam pengembangan negara. Kunjungan wisatawan asing yang begitu banyak ke Indonesia mengakibatkan tambahan devisa negara dari industri wisata sehingga mengakibatkan terjadinya wisatawan masuk ke dalam negara dan akan menambah valuta asing negara. Sehingga dapat diartikan pariwisata merupakan bentuk suatu proses kepergian individu atau kelompok menuju ke tempat yang berbeda.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berkembang secara baik pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong produksi di Provinsi Jawa Tengah bidang pariwisata berperan konsekuensial, sehingga kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah berdampak pada pengeluaran wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Seiring dengan perkembangan zaman, Kota Semarang dengan potensi wisata yang berlimpah terlebih banyaknya dukungan

fasilitas yang menunjang seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Semarang sebagai kota dagang berubah menjadi kota wisata. Kota Semarang menawarkan beragam tempat wisata dengan daya tarik dalam kegiatan pariwisata seperti keragaman etnis, keragaman budaya, warisan sejarah, serta tradisi dari kebiasaan dan kehidupan masyarakat Kota Semarang. Hal tersebut memberikan peluang untuk memasarkan produk wisata yang beraneka ragam.

Tabel 1. Data Wisatawan Kota Semarang Tahun 2016-2020

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2016	56.192	4.627.782
2017	59.672	4.964.804
2018	66.107	5.703.282
2019	81.999	7,150,343
2020	388	252.839

Sumber:

disporapar.jatengprov.go.id

Meningkatnya jumlah pengunjung merupakan bukti nyata bahwa Kota Semarang merupakan salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan asing maupun domestik. Tujuan wisata di Kota Semarang dengan mengedepankan budaya,

alam, dan sesuatu yang unik menjadi minat wisatawan mengunjungi desa wisata. Sehingga desa wisata menjadi salah satu destinasi wisatawan berkunjung ke Kota Semarang.

Desa wisata di Kota Semarang merupakan desa wisata terbaik bagi wisatawan asing dan domestik. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang No. 556/407 tahun 2012 Kota Semarang memiliki 3 desa wisata yang berada di 2 kecamatan, yaitu Desa Wisata Nongkosawit dan Desa Wisata Kandri terletak di Kecamatan Gunung Pati dan Desa Wisata Wonolopo yang terletak di Kecamatan Mijen. Seiring dengan perkembangan wisata khususnya desa wisata di Kota Semarang, Desa Wisata Nongkosawit masih terdengar kurang familiar untuk wisatawan dan masyarakat di Kota Semarang.

Stakeholders menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Handayani & Warsono, 2017). Selain itu menurut Hertifah (2003) dalam (Elista et al., 2020), *stakeholders* adalah pribadi ataupun gabungan beberapa orang atau instansi yang memiliki keabsahan dalam membangun suatu program bersama. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, peran *stakeholders* salah satunya adalah

membuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis seperti penyediaan dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan pariwisata dan upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang pariwisata.

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, peran pemangku kepentingan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Permasalahan pertama yang terjadi adalah permasalahan pada kelompok sadar wisata. Pemahaman tentang desa wisata antar anggota berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan dan mengurangi kekompakan antar anggota. POKDARWIS sendiri juga tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang menyangkut pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dan kurang membimbing masyarakat sekitar (Putri & Yuniningsih, 2019).

Selain itu, permasalahan juga terjadi dengan masyarakat yang ada di Nongkosawit. Partisipasi masyarakat lokal yang rendah dan kesadaran masyarakat setempat akan desa wisata yang ada di daerahnya (Yuliati & Suwandono, 2016). Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih belum ada sektor privat yang mendukung pariwisata dan

memiliki kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan upaya dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit seperti pembangunan infrastruktur dengan pembangunan jalan atau akses menuju desa wisata, lampu penerangan jalan, mengadakan pelatihan-pelatihan anggota PODARWIS guna meningkatkan SDM, serta ikut memfasilitasi kegiatan forum komunikasi desa wisata di Kota Semarang. Akan tetapi, masih ditemukan fasilitas-fasilitas yang belum memadai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

Stakeholders

Stakeholders sendiri diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam suatu program (Nugroho et al., 2014), antara lain:

- a. *Policy creator* merupakan *stakeholders* yang memiliki peran untuk mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan.
- b. Koordinator merupakan *stakeholders* yang memiliki peran untuk berkoordinasi antar *stakeholder* yang ikut berpartisipasi.
- c. Fasilitator merupakan *stakeholders* yang memiliki peran sebagai fasilitator dan mencukupi kebutuhan objek yang dituju.
- d. Implementor merupakan *stakeholders* yang berperan dalam melaksanakan kebijakan yang di dalam kebijakan tersebut terdapat objek yang dituju.
- e. Akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan seperti kontribusi dan menetapkan waktu dengan tujuan agar program yang dijalankan tepat dan sesuai sasaran serta waktu pencapaiannya lebih cepat

Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan tahapan dalam langkah-langkah yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seta tujuan pembangunan (Pebriyanti et al., 2020).

Collaborative Governance

Collaborative governance adalah cara baru untuk memungkinkan pembuat kebijakan yang beragam untuk berdiskusi, mencapai kesepakatan, dan melibatkan aktor non-negara sebagai proses pembuatan kebijakan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah Desa Wisata Nongkosawit, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Subjek penelitian yaitu teknik *purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel secara sengaja yaitu POKDARWIS Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Masyarakat Nongkosawit, dan Wisatawan Desa Wisata Nongkosawit. Serta teknik *snowball sampling* dimana informan selanjutnya adalah Kelurahan Nongkosawit, Bappeda Kota Semarang, Disporapar Jawa Tengah, dan LPPM Unnes. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang

digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data nya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data ini menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Stakeholders

Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima peran yang dimiliki *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Policy Creator

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat tiga *stakeholders* yang memiliki peran sabagai *policy creator* yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah.

Koordinator

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat tiga *stakeholders*

yang memiliki peran sabagai koordinator yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Kelurahan Nongkosawit, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.

Fasilitator

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat enam *stakeholders* yang memiliki peran sabagai fasilitator yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Kelurahan Nongkosawit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah.

Implementor

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat dua *stakeholders* yang memiliki peran sabagai implementor yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang.

Akselerator

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat empat *stakeholders*

yang memiliki peran sabagai akselerator yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Universitas Negeri Semarang, Wisatawan Desa Wisata Nongkosawit dan masyarakat Nongkosawit.

B. Analisis Peran Stakeholders

Policy Creator

Gambar 1. Diagram Policy Creator



Sumber : Peneliti

Meskipun memiliki peran yang sama, dalam hal ini terdapat perbedaan hubungan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah. Dalam hal ini terdapat hubungan antara Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang yaitu sebagai pembuat kebijakan yaitu membuat dan merancang Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan

Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen selaku desa wisata di Kota Semarang yang ditetapkan oleh Walikota

Menurut Ansel (2007) dalam (Matthoriq et al., 2021), menjadikan bahwa dalam pemahaman bersama ada misi, landasan, tujuan, visi, dan ideologi bersama, tujuan yang jelas, arahan, dan strategy yang jelas. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang) memiliki tujuan yang beda dalam pembentukan Desa Wisata Nongkosawit. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung mengusulkan kepada pemerintah kota untuk merintiskan Kelurahan Nongkosawit menjadi salah satu desa wisata di Kota Semarang.

Dalam penetapan desa wisata tidak luput dari peraturan-peraturan pemerintah terkait tentang desa wisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran membuat kebijakan bersama dengan pemerintah daerah (DPRD) membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa

Tengah. Berdasarkan penjelasan dan diagram diatas, diatas Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah sebagai *policy creator* dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit memiliki peran yang berbeda.

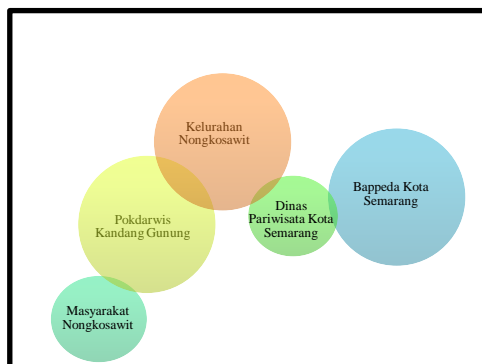
Dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit muncul beberapa *stakeholders* yang mendukung dan ikut mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit. Terjadinya hubungan antar *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Lalu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah sebagai *stakeholders* pendukung dengan menetapkan peraturan tentang desa wisata.

Ansel dan Gash dalam (Tilano & Suwitri, 2019) memberikan penjelasan terkait sistem kolaborasi akan dipengaruhi oleh suatu fenomena yaitu kepentingan dan visi yang dimiliki para *stakeholders* untuk memenuhi tujuan yang ingin

dicapai. Fenomena yang mendorong terbentuknya *collaborative governance* ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan. Dimana di Kelurahan Nongkosawit terdapat beberapa potensi yang mendukung untuk terbentuknya desa wisata dan perlu dikembangkan dan memerlukan pihak yang lain seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, serta untuk membantu dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

Koordinator

Gambar 2. Diagram Koordinator



Sumber : Peneliti

Berdasarkan gambar diatas terdapat tiga *stakeholders* yang memiliki peran sebagai koordinator dalam hal ini Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung melakukan koordinasi

dengan Kelurahan Nongkosawit yakni di forum musrenbang setiap tahunnya untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pengembangan desa wisata. Sebagai koordinator, Kelurahan Nongkosawit melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dalam permasalahan yang terjadi, dalam hal ini Kelurahan Nongkosawit lebih sering berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang sebagai *stakeholder* yang memiliki peran koordinator melakukan koordinasi dengan OPD terkait perkembangan desa wisata secara tidak langsung.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang lebih sering melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang karena merupakan tugasnya untuk pengelolaan pariwisata di Kota Semarang termasuk pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, Kelurahan Nongkosawit sebagai koordinator mengkoordinasikan saran dan kebutuhan masyarakat dan kelompok sadar wisata terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang terkait dengan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit yang diadakan saat musrenbang akhir tahun.

Dalam peran koordinasi, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung selaku pengelola wisata mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Akan tetapi, koordinasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dengan masyarakat masih belum optimal. Sehingga hanya beberapa masyarakat yang ikut serta dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, belum adanya kerjasama dengan pihak swasta juga belum terjalin sampai saat ini.

Koordinasi antar masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung masih kurang. Banyak masyarakat yang belum mau ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Hal ini dikarenakan juga Kelompok Sadar Wisata Kandang Gunung (POKDARWIS) belum merangkul dan mengayomi masyarakat secara baik.

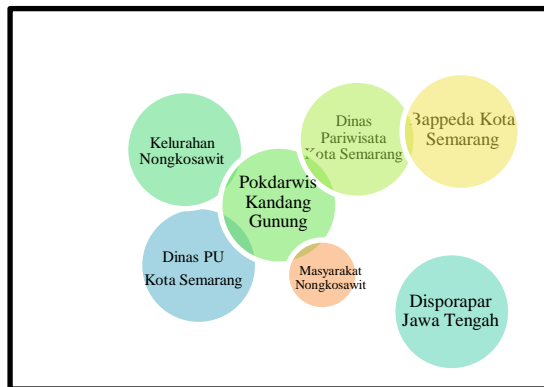
Menurut (Ansell & Gash, 2008) komitmen dapat diilai berdasarkan motivasi untuk ingin berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif. Sehingga dalam hal ini komitmen yang dimaksudkan mengacu terhadap kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disetujui kedua belah pihak yang terlibat. Dalam hal ini,

kerjasama secara kontrak belum terjadi antar Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dengan Universitas Negeri Semarang dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Yang dilakukan oleh kedua *stakeholders* tersebut adalah hanya rekomendasi tanpa adanya kontrak. Pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih belum dilakukannya kerjasama secara hukum dengan pihak swasta.

Akan tetapi, menurut Bovaird dalam (Astuti et al., 2020), bentuk kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerjasama. Kerjasama yang dilakukan ialah bentuk kerjasama yang memiliki keprihatinan di luar kontrak yang tertulis. Peran swasta akan membantu dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga dalam bentuk proses koordinasi dalam penelitian ini, peran swasta dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting.

Fasilitator

Gambar 3. 1 Diagram Fasilitator



Sumber : Peneliti

Berdasarkan diagram diatas terdapat enam *stakeholders* yang memiliki peran sebagai fasilitator. Meskipun memiliki peran yang sama, dalam hal ini terdapat perbedaan hubungan antara Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Kelurahan Nongkosawit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah.

Menurut O’Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015) dalam (Astuti et al., 2020), proses kolaborasi memiliki konsep yang menggambarkan suatu proses memberikan fasilitas dan pelaksanaannya melibatkan banyak organisasi untuk penyelesaian masalah yang dimana tidak

mudah atau tidak dapat diselesaikan organisasi secara sendiri.

Hubungan antara Kelurahan Nongkosawit dengan Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dimana Kelurahan Nongkosawit memberikan bentuk fasilitas seperti pelayanan administratif, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik melalui musrenbang. Dalam hal bentuk fasilitas pemberdayaan masyarakat yang diberikan Kelurahan Nongkosawit terhadap masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Dikarenakan pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki arti untuk mengupayakan pembangunan oleh masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas social guna mencapai tujuan bersama.

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit sendiri pemberdayaan masyarakat masih sangatlah dibutuhkan untuk menimbulkan rasa ingin terlibat dalam membangun dan mengelola wisata di daerahnya sendiri. Dalam hal ini, peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung sangatlah penting dengan memberikan pengertian serta sosialisasi secara rutin terkait dengan Desa Wisata Nongkosawit. Masyarakat Nongkosawit masih belum mau ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, berdasarkan

kutipan wawancara, kesadaran masyarakat terhadap wilayahnya sendiri yang menjadi desa wisata masih sangatlah kurang sehingga pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Dalam peran fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang memfasilitasi kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam bentuk kegiatan pelatihan tentang pengelolaan desa wisata, pelatihan tentang pengelolaan *homestay*, pendampingan pengelolaan desa wisata, lomba pokdarwis, dan pendampingan pengelolaan *homestay*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit memfasilitasi wadah diskusi salah satunya Forum Ekonomi Lokal dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang menjadi wakil pemerintah untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam sector pariwisata. Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tidak berhubungan secara langsung dengan Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung.

Berkaitan dengan memfasilitasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah

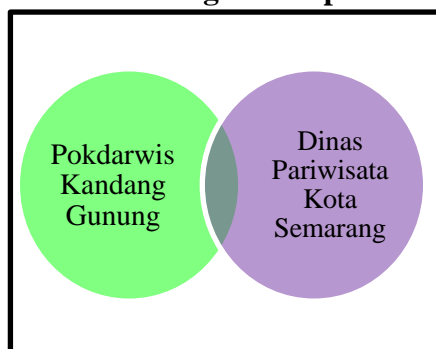
mengadakan kegiatan rutin yaitu Gelar Desa Wisata dan lomba kelompok antar kelompok sadar wisata (POKDARWIS) di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi dan semangat kepada pengelola wisata untuk dapat terus mengembangkan wisata di wilayahnya. Sehingga peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah sebagai fasilitator dapat dikatakan tidak langsung berhubungan dengan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit tetapi secara keseluruhan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut (Nugroho et al., 2014), fasilitator merupakan *stakeholders* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Selain itu fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya (Hunter et al., 1993). Diantara enam *stakeholders* tersebut peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih belum berjalan dengan optimal. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang memiliki hubungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dengan memfasilitasi pembangunan umum seperti akses menuju ke Desa Wisata Nongkosawit dan lampu

jalan. Berdasarkan pendapat dari Pitana dan Gayatri (2005) dalam (Sujendra & Ip, 2019), peran fasilitator dalam pengembangan pariwisata adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung dan diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Akan tetapi, berdasarkan kutipan wawancara masih banyak fasilitas-fasilitas lain seperti lahan parkir dan area untuk acara adat yang masih belum terdapat di wilayah Desa Wisata Nongkosawit.

Implementor

Gambar 4. Diagram Implementor



Sumber : Peneliti

Berdasarkan diagram diatas terdapat dua *stakeholders* yang memiliki peran sebagai implementor yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan Universitas Negeri Semarang. Bentuk implementasi dari Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit memiliki hubungan

yang sama yaitu mengimplementasikan tugas dari masing-masing *stakeholders* yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.

Dalam hal implementasi, Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung melakukan tugasnya yaitu mengelola dan mengatur keberjalannya desa wisata dan melakukan pengorganisasian secara internal pokdarwis. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang melakukan tugasnya sebagai lembaga pemerintah dalam mengurus segala kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, dalam penerapan implementasi oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung yaitu seluruh pengelolaan wisata di Desa Nongkosawit dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung. Selain mengelola seluruh kegiatan wisata Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang untuk membantu dalam mengatasi dan mengelola Desa Wisata Nongkosawit.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang yaitu melaksanakan segala urusan pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata serta memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang.

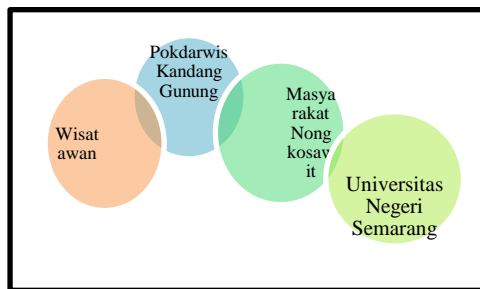
Dalam hal ini, sesuai dengan perannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang sudah melakukan tugasnya dengan benar yaitu melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok sadar wisata untuk dapat mengelola desa wisata supaya menjadi desa wisata yang dapat berkembang dan maju. Kegiatan pemantauan dan monitoring juga dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang dengan mengunjungi secara langsung ke Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang juga melakukan fungsi monitoring berdasarkan laporan dari Kelurahan Nongkosawit.

Menurut (Nugroho et al., 2014), implementor adalah *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung adalah menjalankan tugas dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang yaitu menjalankan fungsi dan tugasnya.

Selain berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung memiliki tugas untuk saling berkoordinasi antar anggota. Akan tetapi masih ditemukannya perselisihan antar anggota yang mengakibatkan komitmen anggota kurang kuat. Menurut (Kurniasih, 2017) keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya tapi juga sistem kelembagaan di masyarakat. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung sebagai lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit, perlu mengoptimalkan kinerja dari seluruh anggota sesuai dengan tugas kelompok sadar wisata.

Akselerator

Gambar 5. Diagram Akselerator



Sumber : Peneliti

Peran akselerator sangatlah penting dalam pengembangan desa wisata dikarenakan mempercepat pencapaian tujuan berdasarkan peran akselerator itu sendiri. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung menjadi pihak yang menunjang keberhasilan desa wisata. Dalam hal ini perannya bersama dengan bantuan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting karena pengelolaan dan keberhasilan desa wisata sangat bergantung kepada hubungan atau kolaborasi antar kedua *stakeholders* tersebut.

Selain Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan masyarakat Nongkosawit, Universitas Negeri Semarang menjadi *stakeholder* yang berperan sebagai akselerator dengan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat serta penelitian. Berdasarkan Tri Dharma Perguruan

Tinggi, terdapat tiga poin penting sebagai bentuk tanggungjawab dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak yang berkaitan atau memiliki keterlibatan dalam proses belajar mengajar.

Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat berupa menerjunkan mahasiswanya dalam program KKN. Dalam mengelola desa wisata diperlukannya kolaborasi dengan *stakeholder* yang lain. Kolaborasi yang dilakukan seperti penerjunan mahasiswa KKN akan membantu pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Karena kegiatan-kegiatan KKN yang melibatkan masyarakat serta memberikan banyak edukasi akan membantu masyarakat di Kelurahan Nongkosawit menjadi lebih baik. Selain itu kegiatan KKN dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang akan memberikan inovasi baru seperti penemuan potensi untuk desa wisata dan pengembangan inovasi yang ada di Desa Wisata Nongkosawit.

Kegiatan kuliah kerja nyata akan memberikan banyak program-program unggulan untuk membenahi ataupun memberikan ide-ide terkait dengan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, kegiatan kuliah kerja nyata akan

memberikan dampak seperti kunjungan wisatawan dikarenakan adanya digitalisasi. Mahasiswa yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata secara tidak langsung akan mempromosikan objek-objek atau kegiatan yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga muncul ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Nongkosawit.

Selain ketiga *stakeholders* diatas, wisatawan menjadi *stakeholder* yang berperan besar dalam mempercepat tujuan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Di era serba digital ini, bagi wisatawan yang senang mengunjungi daerah wisata, social media menjadi pilihan yang tepat untuk mengeksplorasi atau mencari tahu terkait perkembangan wisata di daerahnya. Promosi yang dilakukan oleh wisatawan melalui social mediana akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Hal tersebut akan memunculkan dan menarik wisatawan lain untuk berkunjung karena melihat keunikan dari potensi alam dan budaya di Desa Wisata Nongkosawit.

Menurut (Nugroho et al., 2014) akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. *Stakeholders* yang masih memiliki permasalahan adalah masyarakat

di Nongkosawit dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung.

Berdasarkan pendapat dari Ansell dan Gash dalam (Tilano & Suwitri, 2019), membangun kepercayaan antar *stakeholders* di antara keterbatasan kapasitas dan perbedaan antar *stakeholders*. Akan tetapi masih banyak hambatan yang terjadi di antara kedua *stakeholders* tersebut. Masyarakat di Desa Wisata Nongkosawit masih belum memahami bahwa daerahnya tersebut merupakan desa wisata di Kota Semarang. Sehingga masyarakat Nongkosawit tersebut hanya mengandalkan pokdarwis. Sistem kolaborasi memiliki arti bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki tujuan bersama dan ingin mencapai tujuan tersebut. Tujuan antara pihak masyarakat dan pihak pokdarwis masih belum searah. Serta kepercayaan masyarakat terhadap Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan antar masyarakat Nongkosawit masih sangat perlu ditimbulkan.

Menurut Ansell dan Gash dalam (Tilano & Suwitri, 2019), kepercayaan sangat diperlukan dalam suatu proses kolaborasi. Dengan adanya kepercayaan maka akan memudahkan proses kolaborasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini terdapat dua sisi dari masyarakat yang sepenuhnya percaya dengan kelompok

sadar wisata dan masyarakat yang belum memiliki kepercayaan penuh kepada Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung terhadap pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Akan tetapi kepercayaan tersebut tidak diimbangi dengan aksi, maksudnya adalah masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Hal ini serupa dengan Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung yang masih belum sepenuhnya percaya terhadap masyarakat. Kurangnya kepercayaan antar *stakeholders* akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan Desa Wisata Nongkosawit.

Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara komponen pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. Pada gambar ini tampak ketiga unsur pariwisata berbasis masyarakat, yaitu sumber daya, masyarakat lokal, dan wisatawan saling memberi dan menerima manfaat pengembangan pariwisata (Pebriyanti et al., 2020). Pengaruh wisatawan terhadap pengembangan pariwisata sangatlah besar. Oleh karena itu, hubungan antar pengelola wisata dengan wisatawan harus baik.

Faktor Pendorong dan Penghambat

A. Pendorong

Internal

Berdasarkan penelitian diatas, faktor pendorong secara internal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah keinginan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dalam memajukan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit sangatlah tinggi. Sehingga banyak sekali rencana-rencana dalam pengembangan potensi wisata untuk Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, meskipun kurangnya partisipasi masyarakat, keramahan yang diberikan oleh masyarakat kepada wisatawan sangatlah baik karena keramahan masyarakat akan berpengaruh besar terhadap pengembangan Desa Wisata Nongkosawit sendiri.

Untuk fasilitas seperti jalan besar serta akses menuju ke Desa Wisata Nongkosawit sangatlah mudah. Dengan menggunakan aplikasi *google maps* wisatawan langsung dapat menuju ke Desa Wisata Nongkosawit tanpa kesusahan. Selain akses menuju lokasi yang memadai, Desa Wisata Nongkosawit berdasarkan pendapat masyarakat masih mengelola budaya leluhur dengan baik. Setiap tahunnya, perasayaan budaya di Desa Wisata Nongkosawit dilakukan agar budaya tersebut terus berkembang dan tidak menghilang.

Eksternal

Letak dari Desa Wisata Nongkosawit berdekatan dengan Universitas Negeri Semarang sehingga memudahkan mahasiswa atau masyarakat sekitar lokasi mengunjungi Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, banyaknya kegiatan yang dilakukan di Desa Wisata Nongkosawit juga salah satunya adalah sering menjadi tempat untuk pelaksanaan KKN untuk mahasiswa di universitas Kota Semarang. Hal ini akan membantu pengembangan Desa Wisata Nongkosawit karena dengan berjalannya teknologi dan semakin terdapat pemikiran manusia maka eksistensi Desa Wisata Nongkosawit akan mudah dicari oleh wisatawan dan masyarakat sekitar.

B. Penghambat

Internal

Faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat pada pihak kelompok sadar wisata dan masyarakat. Peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan wisata yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata (POKDARWIS) karena semua pengelolaan diatur oleh kelompok sadar wisata itu sendiri bersama dengan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia di Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan

masyarakat di Kelurahan Nongkosawit masih belum optimal dipicu oleh beberapa faktor.

Faktor pertama adalah pembentukan atau pengorganisasian Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung. Meskipun bersifat sukarela, penyelesaian permasalahan antar internal anggota Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung masih perlu diperbaiki. Sehingga apabila terjadi kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan baik dan kepercayaan antar anggota dapat meningkat.

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit sangat memerlukan partisipasi seluruh masyarakat karena desa wisata sendiri itu terjadi karena keunikan dari kegiatan masyarakat setempat.

Menurut (Ansell & Gash, 2008) hambatan dari adanya proses kolaborasi ialah biasanya terjadi adanya persaingan antara kolaborator dengan pihak lain, enggan ikut berpartisipasi sepenuhnya karena kesibukan, tidak yakin dengan hasil, atau kekhawatiran akan penolakan dari pendapat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat di Kelurahan Nongkosawit masih belum optimal karena perbedaan pendapat dan kesepahaman sehingga menimbulkan konflik antar dusun. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan memiliki arti dimana terdapatnya keikutsertaan masyarakat

dalam pembangunan dan pengembangan sehingga keterlibatannya memberikan manfaat dan hasil. Partisipasi masyarakat hanya dilakukan oleh masyarakat di Dusun Randusari saja. Masyarakat di Dusun Randusari juga tidak semua ikut berpartisipasi penuh. Banyak masyarakat yang terima jadi saja. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan terwujud secara optimal sebagai suatu kegiatan nyata yang terpenuhi dengan tiga faktor yang mendukung pengembangan tersebut, yaitu kesadaran, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam prosesnya.

Eksternal

Pada dasarnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan kemitraan akan selalu terlibat. Menurut Gibson (2011) dalam (Astuti et al., 2020), bentuk kemitraan melibatkan penduduk local, organisasi masyarakat, sector publik maupun sector swasta. Manfaat dari kemitraan dan kerjasama sendiri adalah mencegah terjadinya konflik antar *stakeholders*. Sinergitas yang baik akan tercipta dan terjalin dengan baik antara berbagai *stakeholders*. Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, masih belum adanya bentuk kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

Dengan adanya kemitraan dan kerjasama akan menjadi suatu strategi dalam mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit karena akan mendorong produktifitas masyarakat disana. Akan tetapi sampai sekarang kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta belum terjalin di Desa Wisata Nongkosawit. Kemitraan dan kerjasama harus terjalin antar *stakeholders* karena proses pengembangan desa wisata akan sangat terbantu dengan adanya dua hal tersebut.

Kesimpulan

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, terdapat lima peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat faktor pendorong dan penghambat secara internal dan eksternal. Faktor pendorong secara internal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah keinginan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung untuk terus berinovasi dengan mengembangkan dan menggali potensi wisata di Desa Wisata Nongkosawit, keramahan masyarakat, dan potensi yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Lalu secara eksternal adalah lokasi yang dekat dengan Universitas Negeri Semarang memudahkan untuk mahasiswa melakukan penelitian dan

pengabdian sehingga dalam proses berjalannya perkembangan desa wisata akan terbantu.

Faktor penghambat secara internal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah peran kelompok sadar wisata dan Kelurahan Nongkosawit sangatlah penting untuk ikut memberdayakan masyarakat agar sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih sangatlah rendah. Partisipasi masyarakat hanya dilakukan oleh masyarakat di Dusun Randusari saja. Masyarakat di Dusun Randusari juga tidak semua ikut berpartisipasi penuh. Selain itu faktor penghambat secara eksternal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah belum adanya kemitraan atau kerjasama secara legal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti terkait pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah sebagai berikut:

Permasalahan internal antara masyarakat di Dusun Randusari dan dusun lainnya seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Kelurahan Nongkosawit sebagai fasilitator

dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit seharusnya membantu mengatasi permasalahan yang antar masyarakat seperti permasalahan antar dusun.

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kandang Gunung seharusnya lebih mengajak, mengayomi, dan merangkul masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dengan membuka semua saran serta opini masyarakat terhadap Desa Wisata Nongkosawit. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih muda untuk ikut berpartisipasi dan memberikan pendapat terkait inovasi dan segala masukan untuk pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung seharusnya berusaha untuk melakukan kemitraan dan kerjasama dengan CSR atau pihak swasta. Pemenuhan fasilitas sangat diperlukan karena fasilitas menjadi penunjang pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tahun 2012

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Abd, R. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Elista, A., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363–377.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, 6(1), 1–13.
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Matthoriq, Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji agrotourism” di Kota Batu. *JIAP Vol 7, No 1, Pp 20-29*, 2021, 7(1), 20–29.
- Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari.*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14>

